



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta, Telepon 0274 - 512688,512820



**PANDANGAN UMUM**  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD DIY  
TERHADAP  
PENJELASAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
ATAS  
RAPERDA RPJMD DIY TAHUN 2017-2022

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.  
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang kami hormati

- Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
- Saudara Pimpinan Dewan
- Pejabat Pemerintah Daerah DIY
- Teman-teman Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Teman-teman pers serta hadirin yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi, terhadap Penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas Raperda RPJMD DIY Tahun 2017-2022 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 13 tahun 2018, dalam keadaan sehat wal a'fiat.

*Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati*

Sebagaimana disampaikan Saudara Gubernur DIY pada pidato pengantaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022, bahwa sebelum Rancangan Perda tentang RPJMD dihantarkan telah dilaksanakan beberapa forum untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan guna penyempurnaan rancangan RPJMD. Terkait dengan hal ini, Fraksi PKB menyambut baik dan menghargai langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, sehingga Rencana pembangunan Daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, partisipatif, karena RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, Fraksi PKB akan menyoroti beberapa aspek terkait dengan visi, misi dan sasaran serta indikator Kinerja Utama Daerah. Secara umum, Fraksi PKB sependapat dengan visi RPJMD Tahun 2017-2022, yaitu Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Namun demikian, visi tersebut tidak boleh dilepaskan dari aspek moral atau agama, dan harus menjadi sumber inspirasi, motivasi serta built-in/terintegrasi dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Terkait dengan misi dan peran strategis ke depan, Fraksi PKB sependapat dengan yang Saudara Gubernur telah rumuskan, yakni meningkatkan kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hal

tersebut hanya akan terwujud manakala didukung oleh kinerja Pemerintah Daerah di berbagai aspek pembangunan dan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tanpa peningkatan kinerja, maka visi dan misi pembangunan bisa akan mengalami kegagalan. selanjutnya bahwa pembangunan di masa depan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, atau pembangunan yang pro rakyat, serta harus diimplementasikan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup (masyarakat/penduduk), Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting, karena IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016, IPM D.I. Yogyakarta telah mencapai 78,38, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Sedangkan untuk tahun 2022 ditargetkan 81,68. Namun faktanya di DIY memiliki perbedaan nilai IPM yang cukup besar. IPM tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta dengan nilai 85,32. Sementara itu IPM terendah terdapat di Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 67,82. Dengan demikian terdapat kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang. Langkah apa yang akan ditempuh selama lima tahun kedepan agar IPM di Gunung Kidul meningkat. Mohon penjelasan

Di sisi lain, ketimpangan pendapatan juga masih cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Gini yang mencapai 0,42 pada tahun 2016 atau masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan nilai Rasio Gini nasional sebesar 0,40 pada tahun yang sama. Gini ratio merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah Nilai indeks gini DIY di tahun 2016 adalah 0,4198. Selain itu DIY memiliki angka kemiskinan diatas rata-rata nasional yaitu

(13,20%). Selama lima tahun nilai indeks gini diproyeksikan menurun sebesar 0,0563 menjadi 0,3635 di tahun 2022, dengan target tersebut berarti nilai indeks gini masih dalam kategori sedang, mengapa tidak  $< 0,3$  .Mohon penjelasan.

Masih terkait dengan masalah ketimpangan pendapatan antar wilayah memang juga bukan isu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Nilai indeks Williamson DIY di tahun 2016 adalah 0,4662. Selama lima tahun nilai indeks Williamson diproyeksikan menurun sebesar 0,0174 menjadi 0,4489 di tahun 2022. Estimasi ini masih menggunakan asumsi kondisi pertumbuhan pembangunan yang normal. Dengan demikian tingkat kesenjangan dengan 0,4489 di tahun 2022 masih dalam kategori sedang. Bagaimana bila Rencana pembangunan bandara baru dan mega infrastruktur lain yang sudah direncanakan dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi asumsi, apakah dapat menurunkan tingkat kesenjangan daerah sampai dibawah kurang dari 0,35. Mohon penjelasan

Kemudian yang terpenting bahwa Intervensi pemerintah seharusnya difokuskan pada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan produktivitasnya. Intervensi yang tidak tepat, kurang dapat memberikan efek pendorong bagi kelompok masyarakat terbelakang untuk meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program-program afirmatif dalam rangka peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Dalam Indikator Kinerja Utama Daerah dalam point Indeks pemberdayaan gender, terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen, bahwa pada Pemilu 2014 keterwakilan perempuan, hanya mampu menempatkan 6 (enam) perempuan dari 55 anggota, kemudian bertambah satu orang karena proses

penggantian antarwaktu (PAW). Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan berbagai faktor misalnya peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta faktor rendahnya kepercayaan diri dan juga uang. Sehubungan hal tersebut terkait dengan Indeks Pemberdayaan gender langkah apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong dan mengawal keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019, agar target keterwakilan 30% dapat dipenuhi atau paling tidak meningkat dibanding dengan pemilu 2014 , Mohon penjelasan

Melihat Skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2016 mencapai 73,07 yang berada diatas rata-rata nasional sebesar 56.69. Pencapaian tersebut menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini tentu akan membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. FPKB menyarankan agar Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perlu adanya perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

Terkait dengan draft raperda RPJMD, dalam pasal 5 disebutkan bahwa Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda. Terhadap pasal tersebut FPKB menyarankan menjadi Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah. Selanjutnya mengenai Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah ditetapkan oleh Gubernur. Mohon tanggapan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya agar Raperda tentang RPJMD DIY Tahun 2017-

2022 dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dapat kami sampaikan, dan atas segala perhatian yang diberikan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DIY mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta , 1 Maret 2018

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD DIY

H. Sukanto,SH  
Ketua

Drs. Aslam Ridlo  
Sekretaris

.....

Juru Bicara